



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU



KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2024

**MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	21
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	21
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	21
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	25
4.2. Target Pendapatan Daerah	26
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	29
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga	32

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	34
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	34
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	35
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	37
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	37
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	38
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	40
BAB VIII PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	5
Tabel 2.1.2	Realisasi Kinerja dan Keuangan OPD Kabupaten Mahakam Ulu 2024	5
Tabel 2.1.3	Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dan 2024	8
Tabel 2.1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2022 (%)	12
Tabel 2.1.5	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2022 (%)	13
Tabel 2.2.1	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024	17
Tabel 2.2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022, Penetapan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	19
Tabel 4.2.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	26
Tabel 5.2.1	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ..	32
Tabel 6.2.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022	10
Gambar 2.1.2	Struktur Perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB serta asumsi lain terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah sebagai gambaran perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah terhadap program utama atau prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah sebagai bantuk sinkronisasi kebijakan pusat yang di dasarkan pada kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah sebagai gambaran sisi defisit dan surplus daerah sebagai bentuk antisipasi pembiayaan daerah guna menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Program dan kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 3, Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan daerah; dan
- f. Strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberi pedoman umum atas asumsi-asumsi kebijakan umum Anggaran untuk mengarahkan sumber fiskal Kabupaten Mahakam Ulu guna pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Peraturan Perundang - undangan yang mendasari Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 06).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Searah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 ditujukan dalam rangka mewujudkan visi membangun Mahulu untuk semua, sejahtera, berkeadilan. dengan fokus pada Kesejahteraan masyarakat dan Pemerataan Ekonomi Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2024 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah memuat gambaran umum tentang kondisi ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 seperti laju pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Deskripsi kerangka makroekonomi dan keuangan daerah tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan target sasaran dan prioritas pembangunan. Pada bagian kerangka ekonomi daerah akan memuat tantangan dan peluang ekonomi Mahakam Ulu yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sektoral. Pada sisi keuangan daerah, substansi yang dianalisa adalah perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2024 memberikan Gambaran

capaian kinerja sasaran dan program, serta persentase pencapaian fisik dan keuangan. Hasil evaluasi tersebut diketahui sasaran dan program yang tertinggal dalam pencapaian target sehingga dapat ditentukan perlakuan pada masing – masing program dan dalam kegiatannya. Menjadi bagian dari siklus perencanaan untuk menjaga kinerja sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Capaian indikator makro Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sampai dengan triwulan II 2022-2023 menggambarkan kinerja aspek Pembangunan manusia yang diwakili oleh indicator Indeks Pembangunan Manusia dan aspek Pemabangunan Ekonomi yang diwakili oleh indicator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran terbuka, Indeks Gini dan Tingkat Kemiskinan sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

INDIKATOR PEMBANGUNAN	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)	95,12	100,94	106,71
Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,91	2,49	3,40
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,55	11,38	10,50
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	3,120	3,006	2,435
Indeks Pembangunan Manusia	68,75	69,59	70,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,44	2,60	2,00

Tabel 2.1.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan OPD Kabupaten Mahakam Ulu 2024

KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAH	BERTAMBAH /BERKURANG	REALISASI PER 30 juni	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	214.783.846.979	220.503.065.869	5.719.218.890	49.818.796.819	23%
1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	168.611.793.287	182.645.230.112	14.033.436.825	41.115.031.449	23%
1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.107.979.466.799	1.081.720.050.526	26.259.416.273	164.077.801.562	15%
1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	16.867.808.086	16.944.547.586	76.739.500	5.948.492.861	35%

KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAH	BERTAMBAH /BERKURANG	REALISASI PER 30 juni	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.377.944.202	24.060.652.162	3.682.707.960	6.298.347.801	26%
1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	22.005.487.126	22.825.594.312	820.107.186	3.657.087.611	16%
2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup	16.546.646.102	16.546.635.102	11.000	5.022.491.591	30%
2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.742.499.532	13.144.870.032	1.402.370.500	3.844.811.954	29%
2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	139.199.626.585	139.199.626.385	200	48.402.191.801	35%
2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	50.691.904.448	51.177.982.198	486.077.750	7.063.295.356	14%
2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	40.180.414.003	40.180.413.403	600	5.046.079.904	13%
2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	10.615.984.062	11.490.324.662	874.340.600	2.253.515.723	20%
3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	25.395.708.419	26.040.997.719	645.289.300	2.833.632.589	11%
3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.833.087.778	49.827.954.151	994.866.373	5.947.420.868	12%
4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	59.531.320.817	59.531.320.817	-	6.298.095.505	11%
4.01.0.00.0.00.14.0002	Bagian Hukum	7.214.297.200	7.214.297.200	-	1.083.588.610	15%
4.01.0.00.0.00.14.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	450.710.500	450.710.500	-	71.747.500	16%
4.01.0.00.0.00.14.0004	Bagian Umum	101.078.970.063	106.298.963.063	5.219.993.000	24.186.697.687	23%
4.01.0.00.0.00.14.0005	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.416.735.200	8.416.735.200	-	1.395.542.135	17%
4.01.0.00.0.00.14.0008	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	5.515.813.200	5.515.813.200	-	301.102.300	5%
4.01.0.00.0.00.14.0010	Bagian Administrasi Pembangunan	3.804.834.600	3.804.834.600	-	315.359.314	8%
4.01.2.16.0.00.14.0006	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	0%
4.01.2.16.0.00.14.0007	Bagian Organisasi	920.797.900	920.797.900	-	292.905.160	32%
4.01.2.16.2.10.14.0001	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	0%
4.02.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat DPRD	69.100.032.073	72.100.030.773	2.999.998.700	18.251.575.504	25%
5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-49.335.116.732	-49.529.400.732	-194.284.000	-7.436.191.306	15%
5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah	14.253.568.802	14.851.020.002	597.451.200	4.102.608.751	28%
5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	105.871.030.341	98.230.553.280	7.640.477.061	21.049.881.339	21%
5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.338.150.151	15.338.150.151	-	6.286.774.213	41%
5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.532.151.412	7.532.151.412	-	3.495.389.839	46%
6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat	15.170.419.899	15.170.408.199	11.700	4.459.236.538	29%
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari	6.723.413.302	6.723.413.302	-	1.315.038.688	20%
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai	7.843.466.034	7.843.466.034	-	2.094.365.060	27%
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Long Bagun	6.509.458.074	6.847.589.174	338.131.100	1.251.815.090	18%
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Laham	6.193.345.164	6.193.345.164	-	2.183.983.439	35%
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Long Hubung	5.609.390.433	5.609.390.433	-	2.462.030.272	44%
8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.569.759.995	45.569.664.645	95.350	33.820.900.859	74%
BELANJA		2.435.814.999.300	2.440.000.000.000		493.483.826.998	

Sumber : BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel. 2.2 diatas diperoleh informasi data sebagai berikut :

- a. Realisasi Keuangan APBD triwulan II tahun 2024 adalah sejumlah Rp 493.483.826.998 atau 20% dari total APBD Tahun 2024;
- b. Realisasi Keuangan APBD semester I Tahun 2024 mengambil data pada APBD Pergeseran II; dan
- c. Dalam hal menentukan/menghitung realisasi kinerja beberapa perangkat daerah masih belum memahami cara perhitungannya sehingga Perangkat daerah masih mempersepsikan bahwa Realisasi kinerja nilainya sama dengan Realisasi Keuangan.

Mempertimbangkan arah kebijakan pada RKP tahun 2024, rancangan strategi pengembangan wilayah Kalimantan pada RKP tahun 2024 berdasarkan strategi pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dijadikan sebagai acuan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah dengan tujuan akhir yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional; dan

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Adapun arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Mahakam Ulu pada tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik; dan
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Berdasarkan capaian pembangunan pada tahun 2022 maka disusunlah target sasaran makro pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Realisasi dan Target Sasaran Ekonomi Makro
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dan 2024

Uraian	Realisasi 2022	Target 2024
Indeks Pembangunan Manusia	68,75	70,80
Tingkat Kemiskinan (%)	11,55	9,90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,44	2,00
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,91	3,40

Uraian	Realisasi 2022	Target 2024
Indeks Gini	0,288	0,229
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	94,51	102

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 diharapkan meningkat menjadi sebesar 3,40 persen. Hal ini tentunya didukung dengan peningkatan kontribusi dan laju pertumbuhan pada sektor utama seperti. Pertanian, Perkebunan, dan perikanan serta sektor lainnya yang menjadi sumber pertumbuhan ialah sektor perdagangan dan jasa dan Upaya peningkatan pada sektor pariwisata meningkatkan minat wisata alam. dan kemudahan mobilisasi barang dan jasa didukung oleh penyelenggaraan infrastruktur jalan agar meningkatkan belanja masyarakat tercermin pada peningkatan daya beli konsumsi rumah tangga mendorong terjadinya transaksi antar barang keluar wilayah agar terciptanya peluang investasi

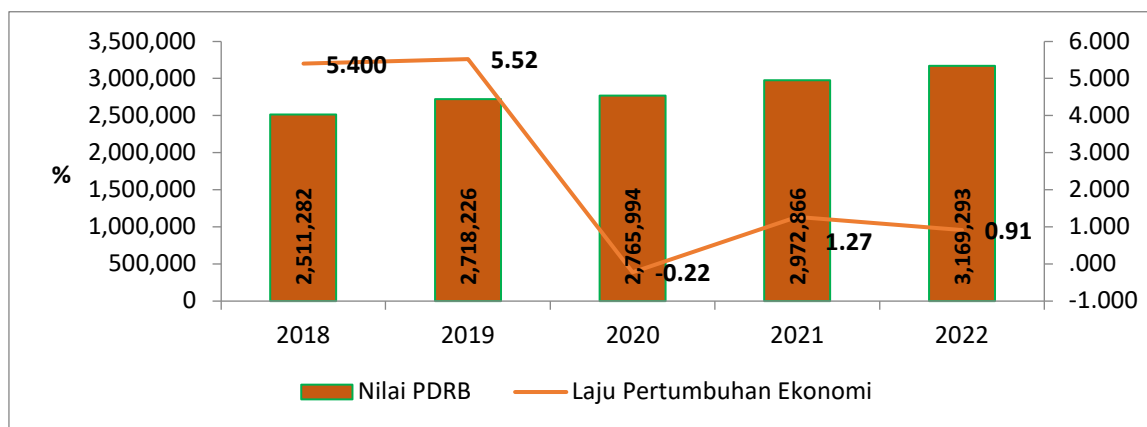
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 juga diharapkan mampu menekan tingkat kemiskinan (9,90 persen), tingkat pengangguran terbuka (2,00 persen) dan indeks gini (0,229). Meningkatnya kinerja perekonomian juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan masyarakat Mahakam Ulu yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan sebesar 70,80 pada tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian;
2. Peningkatan layanan infrastruktur dasar;
3. Peningkatan daya tarik daerah yang berdampak pada penciptaan nilai investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
4. Efisiensi biaya distribusi hasil komoditi pertanian;
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata;
6. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi duni usaha (pada lapangan usaha utama);

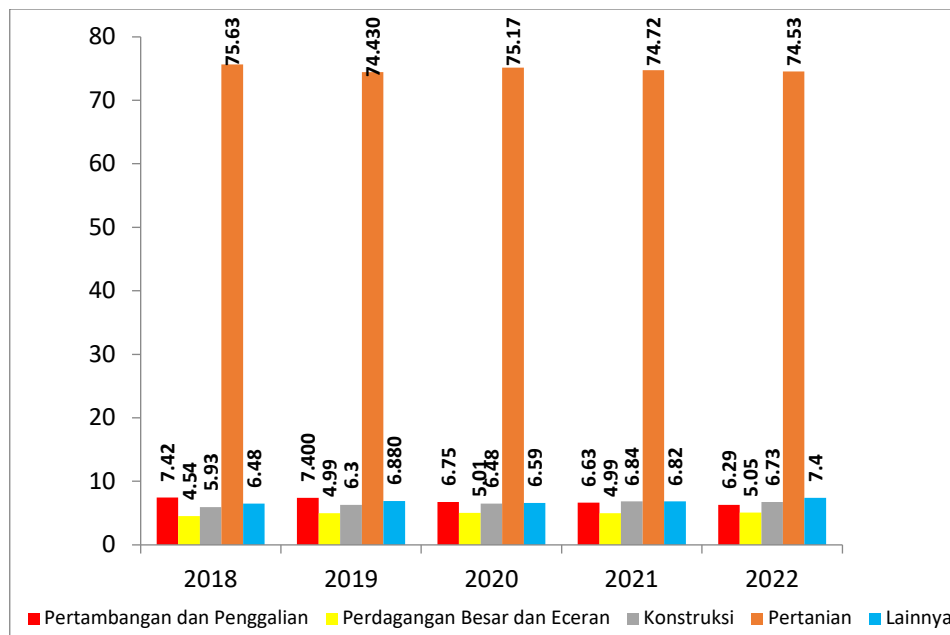
7. Pengembangan pusat-pusat produksi untuk potensi kebutuhan lokal yang dapat dipenuhi secara mandiri; dan
8. Memperkuat peran pelaku usaha dengan memperkuat kerjasama antar pelaku usaha.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan besaran output atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan akibat berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu.



Gambar 2.1.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2023)

Nilai PDRB Mahakam Ulu terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2022, nilai PDRB menjadi sebesar Rp 3,17 triliun. Meningkat jika dibandingkan nilai PDRB tahun 2020 sebesar Rp 2,97 triliun. Namun, kinerja perekonomian Mahakam Ulu pada tahun 2022 yang tercermin melalui laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai 0,91 persen.



Gambar 2.1.2
Struktur Perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018-2022
(Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2023)

Berdasarkan grafik di atas, struktur PDRB Mahakam Ulu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian yang terlihat dari kontribusinya yang berada di atas 70 persen selama tahun 2018-2022. Di luar Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha yang memberi kontribusi cukup besar adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Pada tahun 2022 kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Mahakam Ulu mencapai 74,53 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 3,17 triliun. Kemudian disusul kontribusi Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,73 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,29 persen, serta lapangan usaha lainnya yang memiliki kontribusi di bawah 6 persen.

Tabel 2.1.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2022 (%)

Kategori	I Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,09	4,93	1,03	-0,71	0,05
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	2,62	-12,43	3,90	-0,92
C	Industri Pengolahan	4,34	4,40	-0,14	-0,47	0,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,47	9,64	12,07	15,66	12,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	5,97	6,44	6,65	7,04
F	Konstruksi	8,06	9,13	4,12	13,47	-0,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,49	10,71	1,18	6,82	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	9,83	12,43	-12,59	8,16	11,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,03	12,35	-5,70	4,91	7,41
J	Informasi dan Komunikasi	11,88	12,07	12,23	12,88	13,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,48	9,57	7,78	8,99	17,52
L	Real Estate	5,37	7,22	2,67	6,64	2,34
M,N	Jasa Perusahaan	3,10	6,08	-2,67	1,55	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,64	3,57	6,46	7,63	8,40
P	Jasa Pendidikan	7,17	6,78	7,64	8,60	8,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,15	22,38	21,03	5,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,36	8,79	-1,48	3,54	7,52
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat berdasarkan kontribusi sektor/lapangan usaha pada tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya dimana dominasinya masih berada pada sektor pertanian (dalam arti luas adapun sektor lainnya jika di rangkingkan berdasarkan kontribusinya antara lain sektor Kontruksi Sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, serta sektor transportasi dan pergudangan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 didominasi oleh Pembentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi masing-masing sebesar 30,18 persen dan 24,08 persen. Disamping memberikan kontribusi yang tinggi, PMTB juga mencatatkan angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 11,53 persen.

Tabel 2.1.5
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 – 2022 (%)

Jenis Pnegeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23,62	24,24	24,56	24,08	24,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,05	1,07	1,05	1,00	0,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,55	12,84	12,61	12,26	12,79
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,83	28,69	28,72	30,18	28,89
Perubahan Inventori	0,24	0,19	0,19	0,06	0,06
Net Ekspor Barang dan Jasa	34,70	32,97	32,87	32,41	32,87
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2023

Pada tahun 2022, kinerja perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan perlu didukung oleh kegiatan investasi pada sektor produktif dan jasa. Dampak terciptanya dari investasi meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan proses dari kegiatan produksi, meningkatkan kegiatan perdagangan antar daerah dan terwujudnya nilai tambah yang lebih besar, dan Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap mobilitas sumber daya bahan baku, barang modal dan tenaga kerja secara lebih murah dan mudah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Meninjau arah kebijakan pada RKP tahun 2024, rancangan strategi pengembangan wilayah Kalimantan pada RKP tahun 2024 berdasarkan

strategi pertumbuhan dan pemerataan yang dapat dijadikan sebagai acuan di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain :

1. Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan Ekonomi;
2. Mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia;
3. Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis;
4. Mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan perikanan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;
5. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibunmas;
6. Meningkatkan aksesibilitas Masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan balai – balai Latihan kerja; dan
7. Mendorong Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam.

Mengenai arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Mahakam Ulu pada tahun 2024 antara lain :

1. Peningkatan layanan Pendidikan;
2. Peningkatan layanan Kesehatan;
3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja;
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat miskin;
5. Peningkatan Produktivitas komoditi unggulan Perkebunan;
6. Pengelolaan areal dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di usaha Perkebunan;
7. Peningkatan SDM pelaku Koperasi dan UMKM;
8. Peningkatan layanan Infrastruktur;
9. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
10. Pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Mahakam ulu dalam Upaya Pencapaian target – target Pembangunan di tahun 2023 dan 2024 antara lain :

1. Kondisi geografis yang sulit terjangkau dan belum adanya alternatif Transportasi;
2. Rendahnya produktivitas SDM pada sektor pertanian;
3. Tingginya ketergantungan pada sektor primer (pertanian, peternakan, Perikanan, kehutanan, Perkebunan, pertambangan, dan penggalian);
4. Masih tingginya persentase Tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu (mencapai 2 digit)
5. Arus distribusi barang dan jasa masih dihapakan pada masalah Mahalnya ongkos angkut;
6. Ketergantungan kebutuhan bahan pokok dan penting dari luar Daerah;
7. Belum meratanya Pembangunan dan pelayanan infrastruktur dasar;
8. Lambatnya pemulihan kondisi ekonomi dan sosial dampak Pandemi Covid-19; dan
9. Tren penurunan nilai investasi masih lanjut.

Kabupaten Mahakam ulu mendorong beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan daerah antara lain :

1. Pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan di Kab. Mahulu termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024;
2. Berdirinya Pasar Induk bagi pedagang tradisional;
3. Adanya potensi pengembangan komoditas kelapa sawit untuk menjadi komoditas unggulan baru di Mahakam Ulu;
4. Mahulu sebagai salah satu lokasi program yang mendukung pelaksanaan pengurangan emisi karbon (FCPF-CF);
5. Potensi pasar global terhadap komoditi perkebunan (kakao organik) dan didukung oleh mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas; dan
6. Tren perkembangan minat wisata khusus pada destinasi wisata berbasis alam.

Kerangka perubahan keuangan dapat dilihat dalam proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 angka belanja langsung program/kegiatan masih sementara dan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Secara lebih jelasnya anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat table berikut ini :

Tabel 2.2.1
Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024

KODE REK.			PENDAPATAN	SEBELUM			RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang		
1			2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6 - 3
4			PENDAPATAN DAERAH					
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.889.273.323,00	16.889.273.323,00	94.876.474.774,00	111.765.748.097,00	94.876.474.774,00
4	1	1	Pajak Daerah	3.662.500.000,00	3.622.500.000,00	0,00	3.622.500.000,00	0,00
4	1	2	Retribusi Daerah	1.936.550.000,00	1.936.550.000,00	0,00	1.936.550.000,00	0,00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00	278.732.980,00	0,00	278.732.980,00	0,00
4	1	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.051.490.343,00	11.051.490.343,00	94.876.474.774,00	105.927.965.117,00	94.876.474.774,00
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	1.907.114.193.000,00	1.907.114.193.000,00	-144.937.027.872,0	1.762.177.165.128,00	-144.937.027.872,00
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.720.966.891.000,00	1.720.966.891.000,00	-144.937.027.872,00	1.576.029.863.128,00	-144.937.027.872,00
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.147.302.000,00	186.147.302.000,00	0,00	186.147.302.000,00	0,00
4	3		LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	0,00	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00
4	3	3	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	3.322.660.000,00	3.322.660.000,00	0,00	3.322.660.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				1.927.326.126.323,00	1.927.326.126.323,00	0,00	1.877.265.573.225,00	-50.060.553.098,00
NO		PRIORITAS BELANJA DAERAH		SEBELUM			RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024	Bertambah / Berkurang		
1		2		3	4	5 = 4-3	6	7 = 6 - 3
			BELANJA DAERAH					
			BELANJA OPERASI	1.279.794.124.861,000	1.279.794.124.861,000	102.099.859.545,00	1.382.084.479.720,00	102.290.354.859,00

			Belanja Pegawai	281.939.164.565,00	281.939.164.565,00	5.561.850.007,00	287.501.014.572,00	5.561.850.007,00
			Belanja Barang & Jasa	927.572.719.598,00	927.572.719.598,00	75.121.286.577,00	1.002.694.006.175,00	75.121.286.577,00
			Belanja Subsidi	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	2.000.000.000,00	3.250.000.000,00	2.000.000.000,00
			Belanja Hibah	63.382.240.698,00	63.382.240.698,00	19.416.532.275,00	82.798.772.973,00	19.416.532.275,00
			Belaja Bantuan Sosial	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	190.686.000,00	5.840.686.000,00	190.686.000,00
			BELANJA MODAL	1.020.408.544.607,00	1.020.408.544.607,00	0,00	1.139.315.891.047	118.907.346.440,00
			Belanja Modal Tanah	3.476.157.612,00	3.476.157.612,00	-976.157.612,00	2.500.000.000,00	-976.157.612,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.655.859.314,00	104.655.859.314,00	94.498.301.362,00	199.154.160.676,00	94.498.301.362,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.193.309.408,00	160.193.309.408,00	-25.334.038.199,00	134.859.271.209,00	-25.334.038.199,00
			Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	700.375.134.2738,00	700.375.134.2738,00	52.384.166.629	752.759.300.902	52.384.166.629
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416.263.600,00	416.263.600,00	0,00	416.263.600,00	0,00
			Belanja Modal Aset Lainnya	51.291.820.400,00	51.291.820.400,00	-1.664.925.740,00	49.626.894.660,00	-1.664.925.740,00
			BELANJA TIDAK TERDUGA	23.767.608.132,00	23.767.608.132,00	-9.134.074.471,00	14.633.533.661,00	-9.134.074.471,00
			Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00	23.767.608.132,00	-9.134.074.471,00	14.633.533.661,00	-9.134.074.471,00
			BELANJA TRANSFER	116.029.722.400,00	116.029.722.400,00	114.936.373.172,00	230.966.095.572,00	114.936.373.172,00
			Belanja Bantuan Keuangan	116.029.722.400,00	116.029.722.400,00	114.936.373.172,00	230.966.095.572,00	114.936.373.172,00
JUMLAH BELANJA				2.440.000.000.000,00	2.440.000.000.000,00	327.000.000.000,00	2.767.000.000.000,00	327.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)				-512.673.873.677,00	-889.734.426.775,00	-377.060.553.098,00	-889.734.426.775,00	-377.060.553.098,00
NO		PRIORITAS PEMBIAYAAN DAERAH		SEBELUM		Bertambah / Berkurang	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD - RKPD PERUBAHAN
				RKPD 2024	APBD 2024			
1		2		3	4	5 = 4-3	6	7 = 6 - 3
6	1	PEMBIAYAAN DAERAH						-
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		522.673.873.677,00	522.673.873.677,00	0,00	899.734.426.775,00	377.060.553.098,00

6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	522.673.873.677,00	522.673.873.677,00	377.060.533.098,00	899.734.426.775,00	377.060.533.098,00
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	899.734.426.775,00	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembiayaan neto				512.673.873.677,00	512.673.873.677,00	0,00	899.734.426.775,00	377.060.553.098,00
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN				1.927.326.126.323,00	1.927.326.126.323,00	0,00	1.877.265.573.225,00	-50.060.553.098,00
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN				2.440.000.000.000,00	2.440.000.000.000,00	0,00	2.767.000.000.000,00	327.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)				-512.673.873.677,00	-512.673.873.677,00	0,00	-889.734.426.775,00	-377.060.553.098,00

Sumber: Data Diolah pada SIPD (Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD), Tahun 2024

Tabel 2.2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022,
Penetapan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

Kode	URAIAN	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan 2023 (Rp)	Proyeksi 2024 (Rp)
4	Pendapatan Daerah	1.510.237.599.990	1.236.584.944.894	1.163.877.641.918	1.543.581.871.533	1.498.521.832.669	1.372.548.653.298
4.1	Pendapatan Asli Daerah	18.514.855.998	20.911.222.943	33.164.866.575	16.457.803.277	11.240.054.701	16.889.273.323
4.1.01	Pajak Daerah	2.954.210.690	5.597.170.383	12.352.498.181	2.303.478.193	3.622.500.000	3.622.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.166.240.870	1.208.375.920	1.431.243.628	1.092.553.000	-	1.936.550.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	353.998.938	201.293.387	215.939.538	278.732.980	-	278.732.980
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.040.405.500	13.904.383.251	19.165.185.227	12.783.039.103	7.617.554.701	11.051.490.343
4.2	Pendapatan Transfer	1.395.253.601.792	1.210.217.191.951	1.121.092.861.343	1.527.124.068.256	1.487.281.777.968	1.907.114.193.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.238.435.418.341	1.093.377.769.132	994.563.066.572	1.392.963.173.258	1.310.774.972.903	1.720.966.891.000

Kode	URAIAN	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan 2023 (Rp)	Proyeksi 2024 (Rp)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.238.435.418.341	1.080.616.686.132	873.176.845.172	1.314.684.408.507	1.249.077.631.903	1.524.343.835.128
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	646.650.590.967	569.267.844.930	336.619.807.898	823.517.336.485	710.804.163.903	954.025.207.128
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	497.410.048.000	451.971.660.000	443.010.427.000	442.586.663.455	458.952.273.000	474.866.278.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.877.439.621	45.459.290.194	85.391.704.444	32.365.942.484	53.418.505.000	69.006.517.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	15.497.339.753	13.917.891.008	8.154.905.830	16.214.466.083	25.902.690.000	26.445.833.000
4.2.01.05	Dana Desa	-	-	73.210.794.400	48.520.466.751	51.097.848.000	51.686.028.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	156.818.183.451	116.839.422.819	126.529.794.771	134.160.894.998	176.506.805.065	186.147.302.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	94.924.433.451	57.166.152.000	84.279.794.771	116.471.645.987	138.086.805.065	157.067.608.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	61.893.750.000	59.673.270.819	42.250.000.000	17.689.249.011	38.420.000.000	29.079.694.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	96.469.142.200	5.456.530.000	9.619.914.000	-	-	3.322.660.000
4.3.01	Hibah	18.500.000.000	-	-	-	-	82.798.772.973
4.3.03	Pendapatan Lainnya	77.969.142.200	5.456.530.000	9.619.914.000	-	-	3.322.660.000

Bersumber: BAPENDA, dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, 2023

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu penyusunan KUPA Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, Juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024. Berdasarkan Rancangan Awal RKP 2024, tema RKPD Tahun 2024 adalah *“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”*

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 3,40 Persen;
2. Tingkat Pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 2,00 Persen;
3. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,229;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 70 – 80;
5. Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 9,90 Persen
6. Pertumbuhan PDRB Perkapita ditargetkan sebesar 102.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024, asumsi dasar yang digunakan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yaitu fokus pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM, meningkatkan infrastruktur wilayah, mempercepat transformasi ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan tema tersebut merupakan arah kebijakan Pembangunan tahunan yang dirumuskan pada RPJMD dan merupakan tahun ke empat untuk mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 – 2026 yaitu *“Membangun Mahulu untuk Semua, Sejahtera,*

Berkeadilan”. Tema RKPD tahun 2024 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya dimana kinerja perekonomian belum mampu berperan dalam mensejahterakan Masyarakat, oleh karena itu fokus Pembangunan masih terus diarahkan pada peningkatan potensi daerah untuk penguatan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Perumusan tema dan prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 didasarkan pada analisis terhadap evaluasi capaian kinerja, permasalahan utama dan fokus utama Pembangunan terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas;
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
4. Peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar;
5. Pengarusutamaan pembangunan berbasis lingkungan; dan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Untuk Permasalahan utama terdiri dari :

1. Perekonomian belum mampu berperan optimal membangkitkan multiplier effect bagi kesejahteraan Masyarakat ;
2. Masih rendahnya kualitas SDM;
3. Masih kurangnya pemberdayaan Masyarakat tentang pertanian dalam hal sandang pangan mandiri;
4. Belum memadainya Kualitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang lingkungan keberlangsungan hidup; dan
6. Belum Optimalnya penataan sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Sedangkan untuk fokus utama pembangunan tahun 2024 yaitu terdiri :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;

2. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya;
3. Penguatan Upaya Transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup Masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public; dan
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Oleh sebab itu sesuai dengan hasil evaluasi dan pencermatan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah berbasis kaerifan local maka prioritas Pembangunan pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program – program prioritas Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 terutama program – program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD;
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan – kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
3. Melakukan efisiensi belanja daerah terutama pada belanja – belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara;
4. Menjalankan Participatory Program and budgeting untuk isu – isu yang dominan antara lain : Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi Masyarakat;

5. Meminimalkan efisiensi belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada Masyarakat, melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan Tingkat efektivitas setiap program, melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan – kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan Masyarakat; dan
6. Memberikan bantuan khusus keuangan dalam bentuk. Subsidi untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik, Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager, Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka Pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Penganggaran pendapatan daerah yang merupakan semua penerimaan uang pada RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari :

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1,927,326,126,323,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 50.060.553.098,00) sehingga menjadi Rp1.877.265.573.225,00 atau – 3 % dari APBD murni Tahun Anggaran 2024.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp16.889.273.323,00 bertambah sebesar Rp 94.876.474.774,00 sehingga menjadi Rp 111.765.748.097,00. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1.907.114.193.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp 144.937.027.872,00) sehingga menjadi Rp 1.762.177.165.128,00 atau -8 % jika dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2024. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 3.322.660.000,00, tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Adapun rincian perkiraan proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16,889,273,323	111,765,748,097	94,876,474,774	562 %
4.1.01	Pajak Daerah	3,622,500,000	3,622,500,000	0	0.00%
4.1.02	Retribusi Daerah	1,936,550,000	1,936,550,000	0	0.00%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278,732,980	278,732,980	0	0.00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,051,490,343	57,867,360,737	46,815,870,394	423 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,907,114,193,000	1,762,177,165,128	(144,937,027,872)	-8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,720,966,891,000	1,576,029,863,128	(144.937.027.872)	-8 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186,147,302,000	186.147.302.000	0	0.00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,322,660,000	3,322,660,000	0	0.00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,322,660,000	3,322,660,000	0	0.00%
	Jumlah Pendapatan	1,927,326,126,323	1,829,204,968,845	(98,121,157,478)	- 5%

Sumber : SIPD-RI Pemerintah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Untuk pencapaian target pada tahun 2024, kebijakan belanja diarahkan dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur meningkatkan tingkat kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, disusun didasarkan prioritas yang ada dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Dengan adanya perubahan pendapatan daerah akan berdampak terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2024. Alokasi pagu indikatif anggaran masing-masing perangkat daerah dihitung dengan hasil simulasi perhitungan kebutuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas RKPD 2024, kebutuhan pendanaan program/kegiatan yang bersifat dedicated program serta kebutuhan pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program - program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD.
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara.
4. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:
 - a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

Dalam rangka implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Capaian penerapan SPM di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 sampai tahun 2023 masih belum optimal lantaran disebabkan belum optimal memenuhi tahapan penerapan SPM serta ketersediaan anggaran pemenuhan penerapan SPM. maka Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi pasca bencana banjir serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja operasi

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan atas pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah yang dapat dibelanjakan pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2.767.000.000.000,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1.279.794.124.861,00 menjadi Rp 1.382.084.479.720,00;
- b. Belanja Modal sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1.020.408.544.607,00 menjadi Rp 1.139.315.891,00;
- c. Belanja Tidak Terduga sebelumnya direncanakan sebesar Rp 23.767.608.132,00 menjadi Rp 14.633.533.661,00; dan
- d. Belanja Transfer sebelumnya direncanakan sebesar Rp 116.029.722.400,00 menjadi Rp 230.966.095.572,00

Adapun rincian perkiraan proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1,279,794,124,861	1,382, 084,479,720	102.290.354.859	7,99%
5.1.01	Belanja Pegawai	281,939,164,565	287,501, 014,572	5,561,850,007	1,97%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927,572,719,598	1.002, 694, 006,175	75,121,286,577	8,10%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.04	Belanja Subsidi	1,250,000,000	3,250,000,000	2,000,000,000	160.00%
5.1.05	Belanja Hibah	63,382,240,698	82, 798, 772, 973	19,416,532,275	30.63%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5,650,000,000	5,840,686,000	190,686,000	3.37%
5.2	BELANJA MODAL	1,020,408,544,607	1,139,315,891,047	118,907,346,440	11,65%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3,476,157,612	2,500,000,000	(976,157,612)	-28.08%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,655,859,314	199,154,160,676	94,498,301,362	90,29%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160,193,309,408	134,859,271,209	(25,334,038.199)	-15,81%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700,375,134,273	752,759,300,902	52,384,166,629	7,48%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416,263,600	416,263,600	-	0.00%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51,291,820,400	49,626,894,660	(1,664,925,740)	-3.25%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,767,608,132	14,633,533,661	(9,134,074,471)	-38,43%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23,767,608,132	14,633,533,661	(9,134,074,471)	-38,43%
5.4	BELANJA TRANSFER	116,029,722,400	230,966,095,572	114,936,373,172	99,06%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116,029,722,400	230,966,095,572	114,936,373,172	99,06%
	Jumlah Belanja	2,440,000,000,000	2,767,000,000,000	327,000,000,000	13,40%

Sumber : SIPD-RI Pemerintah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan Rp 512,673,873,677,00 bertambah sebesar Rp 377.060.553.098,00 sehingga menjadi Rp 899.734.426.775,00 sesuai hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. Pelampauan penerimaan PAD;
- b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e. Penghematan belanja;
- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan KUA tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 10.000.000.000,00 yang diperuntukan untuk penyertaan modal pada PT BPD Kaltim Kaltara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan tujuan memperkuat permodalan dan tidak mengalami perubahan. Penambahan setoran modal pada PT BPD Kaltim Kaltara didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Adapun rincian perkiraan proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6.2.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522,673,873,677	899,734,426,775	377.060.553.098	72,14%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522,673,873,677	899,734,426,775	377.060.553.098	72,14%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	522,673,873,677	899,734,426,775	377.060.553.098	72,14%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0%
	Pembiayaan Netto	522,673,873,677	889,734,426,775	377.060.553.098	73,55%

Sumber : SIPD-RI Pemerintah Kab. Mahakam Ulu Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perwujudan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 dituangkan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan disusunnya perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaian di tahun berjalan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil analisis permasalahan pembangunan terkait dengan masalah-masalah strategis yang ada. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut maka disusunlah proritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu yang selaras dan mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto merupakan bentuk perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka peningkatan PAD adalah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu kebijakan yang dapat dipilih untuk memaksimalkan terhadap berbagai kebijakan pajak dan retribusi daerah yang selama ini telah dilaksanakan melalui perbaikan administrasi serta peningkatan efesiensi dan efektifitas PAD dari pajak dan retribusi daerah.

Ada pun arah kebijakan pendapatan tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan penerimaan berdasarkan apa yang telah dijabarkan sebagaimana tersebut diatas melalui strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran;
- b. Meningkatkan kembali efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara online dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan optimalisasi aset daerah;
- f. Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
- g. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
- h. Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan; dan
- i. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi dan belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang bertujuan tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, serta isu strategis di tahun 2024 sesuai Tema RKPD “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 terutama program-program yang berdampak langsung pada pencapaian target kinerja akhir periode RPJMD;
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, BUMKam, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara;
4. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

- pertanian/peternakan, UMKM dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Melakukan efisiensi belanja, melalui :
- a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektivitas setiap program; dan
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
6. Pemberikan dalam bentuk bantuan-bantuan khususnya keuangan yang terdiri dari :
- a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/ komunitas sebagai seed money yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai urban manager; dan
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Pencapaian Pembiayaan Daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang merupakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Pengalokasian pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilaksanakan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada perusahaan daerah sebelumnya.

Kebijakan pembiayaan daerah sebagai akibat defisit anggaran dapat dilakukan melalui antisipasi, jika terjadi defisit anggaran yang berdampak pada penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan jika ada kecenderungan terjadi surplus anggaran maka harus diantisipasi melalui kebijakan yang berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pedoman dasar untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang setiap tahun ditetapkan.

Dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 yang berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang akan disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Mahakam yang bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Untuk menjamin terlaksananya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 pada semua tingkatan perlu adanya kepatuhan dalam pengelolaan pembangunan agar tercapainya sasaran yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam terwujud sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 disusun guna disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Ujoh Bilang, 12 Agustus 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,



Dr. BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H., M.E.